



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA DANGIN PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR TIMUR

I Gede Dodie Permana Putra

BKKBN Provnsi Bali; email : dodie.bkkbn@gmail.com

Abstract

The aim of this research was to find out policy implementation of Family Planning Program and the obstacle factors at the village of Dangin Puri Kelod. Implementation model was using Van Horn and Van Meter theory. This research was conducted at the village of Dangin Puri Kelod, district of East Denpasar, by using qualitative research method. The result of the research regarding Policy Implementation of Family Planning Program at the village of Dangin Puri Kelod shows that the Implementation Implementer understands the general knowledge of Family Planning but the implementation the Policy is still not optimal in terms of funding, group honorariums that are not accommodated in the village budget, the quality of human resources, the attitude of the implementer (FP Field Worker) is not optimal because the quality and quantity in providing information about the program is still inadequate, and fear of childbearing age couples in family planning. Meanwhile the attitude of the Family Planning Field Worker as the Program Implementor should be more active in the promotion, counseling, information and education of family programs, not just at Integrated Health Service for Mother and Children at village level (Posyandu) and Family with Children Under Five Program (BKB) activities. Obstacles of the Implementation of Dangin Puri Kelod Village Family Planning Program Policy is in terms of information and implementation support. The information in question is incomplete information on side effects, how to maintain contraception use and approaches in terms of religion for the type of contraception to be used. The implementation support referred to in this study is the lack of funding for the Family Planning Volunteers honorarium in the village budgeting.

Keywords: *policy implementation, policy of family planning program.*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program Keluarga Berencana dan faktor-faktor penghambatnya di Desa Dangin Puri Kelod. Model Implementasi menggunakan Teori Van Horn dan Van Meter dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod, secara

pemahaman, Pelaksana Implementasi, mengetahui secara umum mengenai Keluarga Berencana ini. Namun dalam pelaksanaannya, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana masih belum optimal dalam hal pendanaan, belum terakomodasinya honor kader dalam anggaran desa, kualitas sumber daya manusia, sikap pelaksana yang belum optimal karena kualitas dan kuantitas dalam memberi informasi mengenai program masih menjadi pertanyaan, dan ketakutan pasangan usia subur dalam ber-KB. Sedangkan sikap PLKB yang seharusnya lebih aktif dalam promosi, konseling, informasi dan edukasi program keluarga berencana ini, bukan hanya sekedar kegiatan posyandu dan BKB. Hambatan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dandin Puri Kelod adalah dari segi informasi dan dukungan pelaksana. Informasi yang dimaksud yaitu kurang lengkapnya informasi mengenai efek samping, bagaimana memelihara alat kontrasepsi dan pendekatan dari segi agama untuk jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Dukungan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya pendanaan untuk honorarium kader KB dalam anggaran yang dimiliki Desa.

Kata kunci : implementasi kebijakan, kebijakan program keluarga berencana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peledakan penduduk tentu membawa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan pelayanan publik. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat mempengaruhi perkembangan bangsa dan ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi, maka dituntut kualitas hidup atau kemakmuran semakin tinggi. Bagi negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini merupakan suatu beban atau suatu refusi. Karena bagi Negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh pada pembangunan sehingga jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah cukup banyak untuk suatu negara berkembang tetapi kualitas hidup atau kemakmurannya masih rendah dilihat berdasarkan GDP (Gross Domestic Product) atau biasa disebut PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita yang relatif rendah.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat, pada pasal 1 poin 8 juga menyebutkan Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan

usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, kemudian ditindak lanjuti dengan lahirnya peraturan pemerintah (Perpres) Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Tujuan Keluarga Berencana. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional(disingkat BKKBN)adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Oleh karena itu untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, melalui Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 – 2019 maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu: 1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) 2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern 3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) 4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.Tahun 2018 di Provinsi Bali dilaksanakan pemilihan Kepala Daerah periode 2018-2023, guna mewujudkan amanah dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tersebut diperlukan kesamaan pandang dan persepsi pada BKKBN, Dinas/Badan/Instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Bali serta seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Bali, sehingga diperlukan sosialisasi tentang Program Keluarga Berencana.

Sementara itu, untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) maka diperlukan perluasan jaringan dengan mitra kerja, baik dari pihak pemerintah maupun swasta serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang memadai. Salah satu indikator kurang berhasilnya program keluarga berencana ialah masih terdapatnya kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi atau yang disebut *unmet need* KB. *Unmet need* secara umum

pengertiannya wanita yang memerlukan KB untuk membatasi kelahiran mencakup wanita hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, wanita yang belum haid dan yang sudah haid setelah melahirkan anak yang diinginkan, yang tidak diinginkan, yang tidak memakai kontrasepsi lagi. Pengukuran Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah perempuan yang kebutuhan ber-KB nya tidak terpenuhi dengan Jumlah Pasangan Usia Subur. Ukuran ini digunakan untuk menilai sejauh mana Program Keluarga Berencana telah dapat memenuhi kebutuhan.

Apabila Program Keluarga Berencana telah berhasil mengatasi kelompok *unmet need* KB, antara lain dengan pemberian layanan KIE dan layanan Keluarga Berencana maka diharapkan pencapaian kesertaan ber-KB akan meningkat dan *unmet need* akan menurun. Secara khusus dalam capaian *unmet need* tahun 2017 dan 2018 maka dapat dijelaskan secara Provinsi Bali dan Kota Denpasar *unmet need* tidak lebih dari 10%, namun di tingkat kecamatan Denpasar Timur dan Desa Daging Puri Kelod *unmet need* masih diatas 10% dapat dilihat di tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2 Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi
Tahun 2017 dan 2018**

Lokasi	Tahun 2017	Tahun 2018
Bali	5,1%	5,3%
Denpasar	8%	8,8%
Denpasar Timur	6,4%	10,7%
Desa Daging Puri Kelod	30 %	17,6 %

Sumber: diolah peneliti dari olahan data lapangan tahun 2017 dan 2018

Data diatas juga menjelaskan Desa Daging Puri Kelod memiliki *unmet need* secara persentase 17,6% dari Pasangan Usia Subur yang ada, Untuk keberlangsungan Program Keluarga Berencana di Desa Daging Puri Kelod merupakan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar. Secara

umum hasil LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar menetapkan target tahun 2018 untuk kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sebesar 9,12%, secara umum Kota Denpasar dapat mencapai target kebutuhan ber-KB ini dengan hasil 8,8 % namun untuk Desa Dangin Puri Kelod kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi mencapai 17,6% sehingga dalam pengamatan sementara bahwa Program Keluarga Berencana ini belum efektif dan berjalan sesuai target yang ingin dicapai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur”.Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur?
2. Faktor-faktor apakah sebagai penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari wawancara: Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar (Kabid KBK3 DP3APPKB Kota Denpasar), Penanggung Jawab Program KB Di Puskesmas Dentim I, Bidan Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Desa Dangin Puri Kelod Kelod Kecamatan Denpasar Timur dan 3 orang Wanita Usia Subur di Desa Dangin Puri Kelod Kelod Kecamatan Denpasar Timur. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dan alat yang digunakan:

Pedoman wawancara, kamera untuk dokumentasi dan dokumen-dokumen penunjang penelitian ini. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Letak Geografis dan Gambaran Umum.

Desa Dangin Puri Kelod dengan luas wilayah 142 ha dengan jumlah penduduk 17.477 jiwa yang terdiri dari laki-laki 8.981 orang dan perempuan 8.496 orang. Desa Dangin Puri Kelod terletak di pusat Kota Provinsi Bali. Batas-batas sebelah utara kelurahan Dangin Puri dan Sumerta Kauh, sebelah timur Desa Sumerta Kelod, sebelah selatan Kelurahan Panjer, dan sebelah barat Kelurahan Dauh.

3.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Program Keluarga

Berencana di Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur

Berdasarkan dimensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Program Keluarga Berencana dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi berdasarkan Model Implementasi Kebijakan dari Van Horn dan Van Meter sebagai berikut:

a. Standard dan Sasaran Kebijakan/Ukuran.

Kebijakan Program Keluarga Berencana di desa Dangin Puri kelod mempunyai tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana tertuang di Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar (DP3APPKB Kota Denpasar) yang merupakan Rencana Pembangunan Kota Denpasar dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran periode ketiga RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Di tahun 2018 target/sasaran untuk program Keluarga Berencana terpenuhi dan hasilnya memenuhi target yang

ditetapkan di tahun 2018. Sasaran secara langsung dari pelaksanaan program Keluarga Berencana adalah seluruh pasangan usia subur yang bertempat tinggal di sekitar lokasi penelitian dan terdapat sasaran tidak langsung yaitu pelaksana program Keluarga Berencana.

b. Sumber Daya.

Sumber daya menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya waktu. Implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*Human Resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*). Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Selain sumber daya manusia, ada pula sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga yaitu sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sumber daya meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang sangat penting dalam proses pelaksanaan program Keluarga Berencana, karena pada dasarnya sumber daya manusia adalah penggerak dari kebijakan tersebut. Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod yaitu PLKB desa itu sendiri.

PLKB sudah ditempatkan dan difungsikan dalam tugasnya masing-masing sumber daya manusia yang dalam hal ini jumlah personil memadai untuk mengimplementasikan program Keluarga Berencana ini, namun dari segi kualitas masih belum optimal dapat dilihat dari masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketakutan efek samping serta paradigma dari segi keagamaan. Sumber daya finansial adalah sumber daya yang berkaitan dengan alokasi dana. Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana sudah didukung sumber daya finansial namun dirasa masih kurang

dianggarkan honorarium untuk kader KB di desa. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas, Puskesmas, Bidan dan PLKB sudah memadai untuk memberikan penyuluhan dan pelayanan Keluarga Berencana di lokasi ini. Sumber daya waktu adalah sumber daya terkait waktu. Fakta dilapangan ditemukan bahwa waktu pelaksanaan program Keluarga Berencana dilakukan melalui kegiatan Posyandu dan gebyar-gebyar penyuluhan dan kurangnya kunjungan rumah dan pertemuan perorangan oleh PLKB sebagai petugas lapangan.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana.

Keberhasilan yang dapat dicapai dalam menjalankan sebuah kebijakan tidak lepas dari karakteristik yang dimiliki oleh badan pelaksana kebijakan. DP3APPKB Kota Denpasar merupakan instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di Denpasar. Tugas pokok yang dilaksanakan dalam hal ini DP3APPKB Kota Denpasar adalah pelayanan, sosialisasi dan distribusi alat-alat kontrasepsi. Puskesmas dalam pelayanan KB kegiatannya seperti mempersiapkan kelengkapan pelayanan di Klinik KB, membuat pencatatan dan pelaporan KB, melaksanakan koordinasi lintas program. Tugas Bidan Desa sebagai mitra kerja adalah melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana kepada wanita usia subur (WUS) dan melaksanakan mekanisme pencatatan dan pelaporan terpadu pelayanan puskesmas sedangkan tugas dari PLKB Desa adalah mempunyai peran, baik sebagai pelaksana, pengelola maupun sebagai penggerak dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di Desa/Kelurahan. Selain mempunyai tugas dan fungsi sesuai karakteristik dalam praktik pelaksanaan program Keluarga Berencana, karakteristik Organisasi dapat dilihat dari Struktur Organisasi.

d. Sikap Para Pelaksana.

Variabel ini mencakup respon pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kondisi yang merupakan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi pelaksana yang merupakan preferensi nilai yang dimiliki oleh

pelaksana. Sehubungan dengan penelitian ini, pelaksanaan program KB mendapatkan respon sebagai berikut: DP3APPKB Kota Denpasar, Penanggung Jawab Program KB di Puskesmas Dentim I, dan Bidan Desa melaksanakan pelaksanaan optimal yang disesuaikan dengan tugas pokok fungsinya namun peran PLKB masih belum optimal sikapnya dalam melaksanakan program ini, yang seharusnya lebih aktif dalam promosi, konseling, informasi dan edukasi Program Keluarga Berencana bukan hanya saat kegiatan, Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB), karena banyak kegiatan kemasyarakatan yang lain yang dapat diselipkan untuk memberikan informasi mengenai Program Keluarga Berencana dan kunjungan kepada Pasangan Usia Subur yang Potensial untuk menggunakan kontrasepsi/ber-KB untuk mendekatkan perannya di masyarakat.

e. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.

Salah satu keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, adalah komunikasi. Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Berencana tidak terlepas dari banyaknya pelaksana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, maka dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik agar program Keluarga Berencana dapat berhasil dan mampu mencapai tujuannya. Puskesmas, Dinas Kesehatan, DP3APPKB Kota Denpasar, Bidan Desa, PLKB dan Kader yang sudah melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan baik. Dalam penguatan aktifitas, pelaksanaan kebijakan program Keluarga Berencana oleh DP3APPKB Kota Denpasar, Puskesmas, Bidan Desa, dan PLKB sudah melaksanakan sosialisasi terkait program Keluarga Berencana ini.

f. Kondisi sosial, politik dan ekonomi.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi merupakan salah satu indikator pendukung pelaksanaan program KB, mengingat bahwa program KB adalah sebuah kebijakan yang ditujukan kepada publik sehingga banyak kondisi sosial, politik dan ekonomi saat pelaksanaannya. Kondisi sosial

pada saat pelaksanaan program KB di Desa Dangin Puri Kelod adalah masyarakat dapat menerima Program Keluarga Berencana ini. Kondisi politik mengenai pelaksanaan program Keluarga Berencana, Pemerintah Kota Denpasar (Walikota) melalui DP3APPKB Kota Denpasar selalu mendukung dan memberikan apresiasi kepada warga dan agen pelaksana pada setiap kegiatan/acara Keluarga Berencana, Kecamatan memberikan dukungan dengan menyediakan tempat dan ijin di tiap kegiatan pelaksanaan program. Selain itu dukungan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yaitu menyediakan tempat untuk PLKB yang ditugaskan di tiap kecamatan dan desa. Kondisi ekonomi yang terjadi saat pelaksanaan program Keluarga Berencana adalah warga mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana dari sektor swasta dan pemerintah yang menunjukkan tidak ada kendala dalam ekonomi karena masyarakat dapat memilih pelayanan yang berbayar dan tidak berbayar sesuai kemampuan ekonomi.

3.3 Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur.

Menurut Bambang Sunggono faktor penghambat Implementasi Kebijakan yaitu: isi kebijakan, informasi, dukungan pelaksana, dan pembagian potensi. Dari hasil wawancara diatas menunjukkan pada Desa Dangin Puri Kelod belum optimalnya pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Berencana adalah informasi dan dukungan pelaksana. Informasi yang dimaksud yaitu kurang lengkapnya informasi mengenai efek samping pemakaian KB, bagaimana memelihara alat kontrasepsi agar meminimalisir efek sampingnya dan pendekatan dari segi agama untuk jenis kontrasepsi yang akan digunakan yang seharusnya dapat diperjelas oleh PLKB sebagai petugas penyuluhan program ini. Dukungan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya pendanaan untuk honorarium kader KB dalam anggaran yang dimiliki Desa.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan terdapat kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan Program Keluarga Berencana masih belum optimal dalam hal pendanaan, belum terakomodasinya honor kader dalam anggaran desa dan kualitas sumber daya manusia serta sikap pelaksana dalam hal ini PLKB belum optimal karena kualitas dan kuantitas dalam memberi informasi mengenai program Keluarga Berencana.
2. Hambatan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Desa Dandin Puri Kelod segi informasi dan dukungan pelaksana. Informasi yang dimaksud yaitu kurang lengkapnya informasi mengenai efek samping pemakaian KB, bagaimana memelihara alat kontrasepsi agar meminimalisir efek sampingnya dan pendekatan dari segi agama untuk jenis kontrasepsi yang akan digunakan yang seharusnya dapat diperjelas oleh PLKB sebagai petugas penyuluhan program ini. Dukungan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya pendanaan untuk honorarium kader KB dalam anggaran yang dimiliki Desa.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka peneliti mengajukan saran:

1. Desa Dandin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur diharapkan menganggarkan honor untuk kader.
2. Pelaksana Kebijakan mempunyai inovasi untuk memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
3. Pasangan Usia Subur dapat meluangkan waktu untuk mendengar penyuluhan dan edukasi mengenai Keluarga Berencana.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Anonim. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai Pustaka.

- Abidin, Said Zainal. 2012 *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
_____. 2013. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- BKKBN. 2007. *Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta : BPS, BKKBN, DepKes.
- _____. 2015. *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*. Jakarta: BKKBN.
- _____. 2017. *Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta : BPS, BKKBN, DepKes.
- BPS. 2018. *Statistik Indonesia 2018*. Jakarta: CV Dharmaputra.
- _____. 2019. *Provinsi Bali Dalam Angka*. Denpasar: CV Bhineka Karya.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Dunn, William.N. 1998. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- _____. 1984. *Public Policy Implementing*, London : Jai Press Inc.
- Hartanto, Hanafi. 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan public Berbasis Dynamic Policy Analisis Edisi ke-2 Revisi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy,M. Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Juliantoro, Dadang. 2000. *30 Tahun Cukup: Keluarga Berencana dan HakKonsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mustakim. 2012. *Cakrawala KB, Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: GP Press.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- _____, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan –Analisis Kebijakan –Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto, Agus dkk. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sanjaya, Wina. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana
- Siagian, M. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Medan: PT Grasindo Monoratama.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutopo, Ariesto Hadi dkk. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Van Meter, D S and Van Horn C E. 1974. *The Policy Implementation Process. A Conceptual framework : Administration And Society*.
- Wahab, Abdul Solichin, 1997. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijaksanaan Publik* Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- _____. 2007. *Kebijakan Publi: Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2008. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta : Media Pressindo.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Sumber Jurnal / Artikel /Tesis

- Ana Diro,dkk. 2014. *Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.Vol 2 no 1 : 15-28.
- Andi Kamerah. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (Studi Pembinaan Kesehatan Fisik Bagi Lansia) Di Yayasan Al Kautsar Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Universitas Tadulako Vol 4 no 3: 156-167.
- Heny Purwandiyah. 2013. *Implementasi Program Keluarga Berencana dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (Studi di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur)*. Jurnal Paradigma Administrasi Publik Vol 2 no 1: 127-132.
- Ika Andriani. 2018. *Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Vol 1 no 1: 1-11.
- Jusliati. 2018. *Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makasar volume 4 no 1:16-33.
- Mahmudin. 2015. *Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat*. Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 4 Edisi Desember 2015.
- Muhammad Rizal. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Partisipasi KB Pria Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pekanbaru. Vol 3 no 2: 1-11.
- Prasetyawan. 2013. *Implementasi Program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (Studi Kasus Penggunaan Medis Operasi Pria dalam Program Keluarga Berencana Pria)*.

Journal Of Public and Management Review Universitas Diponegoro.Vol 2 no 4: 1-10.

River Kurnia. 2013. *Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser*. E-Journal Administrasi Negara Universitas Mulawarman.Vol1 no 4: 1673-1684.

Sudarniasih. 2016. *Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu*. Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjung Pura. 1-17.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Perpres Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Tujuan Keluarga Berencana

Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 – 2019

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Sumber Website

Ana Diro,dkk.2014. *Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Sidoarjo* <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp/article/view/405> diakses 10 April 2019.

Andi Kameron. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (Studi Pembinaan Kesehatan Fisik Bagi Lansia) Di Yayasan Al Kautsar Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*.<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6562>.

Heny Purwandiyah. 2013. *Implementasi Program Keluarga Berencana dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (Studi di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur)*. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/348> diakses 11 April 2019.

Ika Andriani. 2018. *Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu*.<https://ejournal.umsida.ac.id/index.php/ajournal/article/view/1000>.

unsrat.ac.id/index.php/ jurnaleksektif/article/view/19802 diakses 11 April 2019.

Jusliati. 2018. *Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*.<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/1426>.

Mahmudin. 2015. *Implementasi Kebijakan Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kelurahan Pallima Kecamatan Pontianak Barat* <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika/article/view/817> diakses 11 April 2019.

Muhammad Rizal. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Partisipasi KB Pria Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir)*<https://media.neliti.com/media/publications/117596-ID-implementasi-kebijakan-program-keluarga.pdf> diakses 10 April 2019.

Prasetyawan. *Implementasi Program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (Studi Kasus Penggunaan Medis Operasi Pria dalam Program Keluarga Berencana Pria)*.<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/3616> diakses 10 April 2019.

River Kurnia. *Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser*. <https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=870> diakses 10 April 2019.

Sudarniasih. *Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu*.<https://www.neliti.com/publications/190277/implementasi-program-keluarga-berencana-kb-dipuskesmas-rawat-jalan-wajok-hulu-k> diakses 11 April 2019.